

**DOKUMEN
TIDAK
DIPERSYARATKAN**

**PERNYATAAN PPID UTAMA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

Terhadap pertanyaan kuesioner Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 mengenai:

Aspek Barang dan Jasa

II dan III Mengumumkan Dokumen Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

(Pengadaan Jasa Lainnya PCO Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Ke-32)

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026, terdapat beberapa dokumen yang sama sekali tidak dipersyaratkan pada beberapa pengadaan barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
II. Pengumuman Informasi Tahap Pemilihan		
8.	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
9.	Gambar Rancangan Pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
10.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
13.	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
14.	Berita Acara Pemberian Penjelasan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
16.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa

III. Pengumuman Tahap Pelaksanaan		
4.	Surat Jaminan Pelaksanaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
5.	Surat Jaminan Uang Muka	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
6.	Surat Jaminan Pemeliharaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Jakarta, September 2026
 PPID Utama,
 Kementerian Koordinator Bidang
 Perekonomian *th*



Haryo Limanseto

PERNYATAAN PPID UTAMA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Terhadap pertanyaan kuesioner Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 mengenai:

Aspek Barang dan Jasa

II dan III Mengumumkan Dokumen Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

(Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Pendukung Pendukung Project Management Office (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk Kemudahan PSN pada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP))

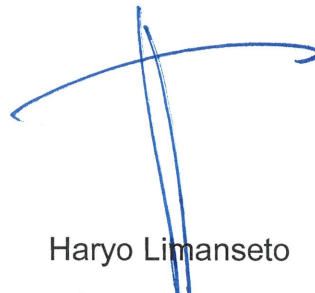
Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026, terdapat beberapa dokumen yang sama sekali tidak dipersyaratkan pada beberapa pengadaan barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
II. Pengumuman Informasi Tahap Pemilihan		
8.	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
9.	Gambar Rancangan Pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
10.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
13.	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
14.	Berita Acara Pemberian Penjelasan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
16.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa

III. Pengumuman Tahap Pelaksanaan		
4.	Surat Jaminan Pelaksanaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
5.	Surat Jaminan Uang Muka	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa
6.	Surat Jaminan Pemeliharaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Jakarta, September 2026
 PPID Utama,
 Kementerian Koordinator Bidang
 Perekonomian *HL*



Haryo Limanseto